JUMABI : Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis

e-ISSN: 2985-3834 (Online - Elektronik)
Volume.4 | Nomor.1 | Januari 2026 | PP: 39-46
DOI: https://doi.org/10.56314/jumabi.v4i1.477

Systematic Literature Review: Dampak Subsidi Pemerintah terhadap Mekanisme Pasar

Wahyu Muh. Syata
Prodi Pendidikan EKonomi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Corresponding author
*E-mail:
wahyumuh.syata@uho.ac.id

Article history
Received : *2026-01-22*
Revised : *2026-01-28*
Accepted : *2026-01-29*

Copyright © 2026 Author.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak

Salah satu cara pemerintah mengendalikan kekuatan pasar, menjaga harga tetap stabil, dan meningkatkan kesejahteraan publik adalah melalui subsidi. Hal ini sangat penting di bidang-bidang seperti energi dan pertanian. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa subsidi pemerintah memiliki dampak yang berbeda terhadap mekanisme pasar. Pada pasar persaingan sempurna, subsidi menurunkan biaya produksi dan meningkatkan output sehingga mendorong efisiensi pasar. Sebaliknya, pada pasar monopoli subsidi dapat meningkatkan harga keseimbangan dan memperkuat pelaku pasar dominan, yang berpotensi menimbulkan distorsi dan ketimpangan distribusi manfaat. Subsidi energi memengaruhi inflasi melalui perubahan biaya produksi dan daya beli masyarakat, sementara subsidi pupuk dan bantuan mesin pertanian meningkatkan produktivitas tetapi belum tentu meningkatkan pendapatan petani tanpa dukungan kebijakan harga dan pemasaran. subsidi pemerintah perlu dirancang secara tepat sasaran dan terintegrasi dengan kebijakan pasar

Kata Kunci: Subsidi Pemerintah; Mekanisme Pasar; Harga

PENDAHULUAN

Salah satu alat kebijakan ekonomi strategis untuk mengendalikan dinamika pasar guna mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah subsidi pemerintah. Untuk membuat beberapa komoditas lebih terjangkau bagi konsumen, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, subsidi biasanya diberikan untuk mengurangi biaya produksi atau harga jual. Diharapkan dengan adanya subsidi ini, jumlah komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi akan meningkat sekaligus menjaga stabilitas harga pasar. Hal ini menjadi krusial karena fluktuasi harga yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berdampak buruk pada kesejahteraan umum masyarakat. Oleh karena itu, komponen kunci dalam mengembangkan kebijakan ekonomi adalah memahami bagaimana subsidi memengaruhi kuantitas dan harga dalam sistem pasar.

Subsidi yang dibayarkan langsung kepada produsen maupun subsidi yang dibayarkan langsung ke petani akan memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya (wastra, A. R. & Ahmad Dalhar 2021). Subsidi tidak selalu berdampak baik dan dapat berbeda tergantung pada struktur pasar saat ini. Subsidi energi di Indonesia sering kali dijustifikasi untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi praktiknya lebih menguntungkan elit ekonomi (Putri et al., 2025). Subsidi biasanya menghasilkan harga pasar yang lebih rendah dan lebih banyak komoditas yang dapat diakses di pasar dengan persaingan sempurna, di mana banyak produsen dan pelanggan berinteraksi secara bebas. Kebijakan ini juga membantu mengatasi tantangan lokal dan mengurangi disparitas dalam pembangunan pedesaan (Putri & Kumbara, 2024). Subsidi, di sisi lain, memiliki kekuatan untuk mengubah cara produsen tunggal menetapkan harga dan kuantitas dalam pasar monopoli, yang berdampak jelas pada kesejahteraan konsumen dan efisiensi pasar. ubsidi yang tepat sasaran dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan keadilan ekonomi, berkontribusi pada keseimbangan pasar dan pendapatan disposabel. (Savitri et al., 2024). Bahkan distorsi pasar seperti kelebihan produksi, pemborosan sumber daya, dan beban keuangan yang signifikan bagi pemerintah dapat diakibatkan oleh subsidi yang tidak tepat sasaran. Agar kebijakan yang diterapkan berhasil dan efisien, analisis dampak subsidi harus mempertimbangkan faktor-faktor pasar.

Subsidi juga penting untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis seperti pangan dan energi yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan umum. Subsidi energi adalah dukungan finansial pemerintah untuk menyediakan energi terjangkau bagi masyarakat miskin, yang bertujuan meningkatkan akses terhadap energi modern, serta berdampak positif pada produktivitas, pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga membantu mengurangi kemiskinan (Paramita et al., 2020). Pemerintah dapat menjamin pasokan komoditas di pasar dan melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga yang tiba-tiba dengan menerapkan subsidi. Untuk menghindari beban keuangan yang tidak

semestinya dan mengganggu sistem pasar yang sehat, pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan ruang lingkup dan tujuan subsidi.

Subsidi pupuk di Indonesia merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui penyediaan pupuk bersubsidi, pemerintah berupaya menekan biaya produksi pertanian sehingga petani dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi usahataninya. Peningkatan kapasitas produksi ini diharapkan mampu mendorong hasil panen yang lebih optimal, menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, serta memperkuat ketahanan pangan. pemerintah untuk mendukung sektor pertanian, menjaga harga barang tetap rendah, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, subsidi pupuk tidak hanya berperan dalam mendukung produktivitas sektor pertanian, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi petani (Heliaantoro & Juwana, 2018). Temuan dalam penelitian Rahardyan et al., (2022) menunjukkan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal dan ketidakpatuhan terhadap SOP yang menghambat efektivitas pengelolaan subsidi.

Dasar pemberian subsidi merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan negara dalam memberikan subsidi guna melindungi kepentingan masyarakat, termasuk petani dan konsumen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengatur peran negara dalam menyediakan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk bersubsidi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menjadi dasar kebijakan subsidi energi bagi masyarakat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana subsidi pemerintah memengaruhi mekanisme pasar, khususnya bagaimana harga dan kuantitas barang berfluktuasi di pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konsekuensi subsidi dan implikasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan publik sambil menjaga efisiensi pasar dan keberlanjutan fiskal pemerintah. Diharapkan temuan penelitian ini akan membantu para sarjana dan pembuat kebijakan untuk lebih memahami mekanisme pasar dan dinamika subsidi.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Studi literatur dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik dampak subsidi pemerintah terhadap mekanisme pasar.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- Buku teks ekonomi mikro dan kebijakan publik
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional
- Artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu
- Laporan resmi pemerintah dan lembaga internasional
- Publikasi akademik yang relevan dengan subsidi dan mekanisme pasar.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara:

- Membaca dan memahami isi literatur secara mendalam
- Membandingkan pandangan dan temuan para ahli terkait dampak subsidi pemerintah
- Mensintesis hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh subsidi terhadap mekanisme pasar
- Menarik kesimpulan berdasarkan pola, persamaan, dan perbedaan hasil penelitian yang dikaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa subsidi pemerintah merupakan instrumen kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap mekanisme pasar, baik dalam pembentukan harga, struktur pasar, maupun distribusi kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya petani. Namun, dampak subsidi tersebut tidak selalu sejalan dengan tujuan efisiensi pasar dan peningkatan kesejahteraan apabila tidak didukung oleh struktur pasar yang kompetitif dan mekanisme distribusi yang efektif.

Penelitian Hardiani dan Umiyati (2015) mengungkapkan bahwa harga keseimbangan empiris lebih tinggi pada pasar monopoli dibandingkan pasar persaingan sempurna, serta lebih tinggi pada kondisi subsidi dibandingkan non-subsidi. Temuan ini menunjukkan bahwa subsidi pemerintah dapat menyebabkan distorsi mekanisme pasar apabila diterapkan dalam struktur pasar yang tidak kompetitif. Dalam pasar monopoli, subsidi berpotensi memperkuat kekuatan pelaku pasar dominan sehingga harga tidak terbentuk secara efisien melalui interaksi permintaan dan penawaran. Akibatnya, manfaat subsidi tidak sepenuhnya diteruskan kepada produsen kecil atau konsumen, melainkan terakumulasi pada pelaku pasar tertentu.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Setiawan dan Sengadji (2016) yang menyatakan bahwa instrumen kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input–output yang berlaku belum memberikan insentif yang memadai bagi petani kelapa di Kabupaten Flores Timur. Mekanisme pasar yang tidak berpihak pada petani menyebabkan nilai tambah dan keuntungan yang diterima petani lebih rendah dibandingkan keuntungan sosial yang seharusnya. Hal ini mencerminkan adanya kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan kebijakan (policy failure), di mana subsidi dan intervensi pemerintah belum mampu memperbaiki distribusi manfaat dalam rantai pasar pertanian.

Selain memengaruhi harga dan struktur pasar, subsidi pemerintah juga berdampak pada stabilitas makroekonomi, khususnya inflasi. Penelitian

Sarbaini dan Nazaruddin (2023) menunjukkan bahwa subsidi BBM memiliki dampak signifikan terhadap inflasi, di mana penurunan subsidi menyebabkan kenaikan harga BBM yang selanjutnya mendorong inflasi. Inflasi ini memengaruhi mekanisme pasar melalui peningkatan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya menggeser kurva penawaran ke kiri dan menyebabkan kenaikan harga output pertanian. Kondisi tersebut memperlemah daya beli petani dan mengurangi efisiensi pasar.

Dalam konteks kesejahteraan petani, hasil penelitian Siagian et al. (2023) menekankan pentingnya realisasi pupuk subsidi serta stabilitas biaya produksi dan harga hasil panen. Subsidi pupuk berperan dalam menurunkan biaya input, sehingga mampu menjaga keseimbangan mekanisme pasar antara biaya produksi dan pendapatan petani. Apabila subsidi tidak terealisasi dengan baik atau terjadi ketidakstabilan harga, maka mekanisme pasar menjadi tidak efisien dan kesejahteraan petani cenderung menurun.

Temuan Ahsani (2020) memperkuat argumen bahwa subsidi yang bersifat produktif, seperti subsidi pupuk dan bantuan alat serta mesin pertanian (alsintan), memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan produksi padi. Dari perspektif mekanisme pasar, peningkatan produksi mencerminkan pergeseran kurva penawaran ke kanan, yang berpotensi menurunkan harga dan meningkatkan jumlah output. Namun, tanpa pengaturan pasar dan kebijakan harga yang memadai, peningkatan produksi tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan petani.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa subsidi pemerintah memiliki dampak yang kompleks terhadap mekanisme pasar. Subsidi dapat meningkatkan produksi dan menurunkan biaya input, namun juga berpotensi menimbulkan distorsi harga, memperkuat struktur pasar yang tidak kompetitif, serta memicu inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, efektivitas subsidi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme pasar sangat bergantung pada kesesuaian desain kebijakan, struktur pasar yang mendukung persaingan sehat, serta sistem distribusi yang mampu memastikan manfaat subsidi diterima oleh pelaku ekonomi yang tepat, khususnya petani.

Berdasarkan hasil pembahasan, subsidi pemerintah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap mekanisme pasar, baik dalam pembentukan harga, struktur pasar, maupun kesejahteraan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan subsidi perlu dirancang secara lebih terintegrasi agar mampu meminimalkan distorsi pasar dan memaksimalkan manfaat bagi petani. pemerintah perlu memperbaiki struktur pasar pertanian agar lebih kompetitif. Temuan bahwa subsidi pada pasar monopoli justru meningkatkan harga keseimbangan menunjukkan perlunya pengawasan terhadap pelaku pasar dominan, seperti tengkulak atau distributor input-output. Kebijakan subsidi sebaiknya disertai dengan regulasi tata niaga, penguatan koperasi petani, serta pemangkasan rantai distribusi agar manfaat subsidi benar-benar diteruskan kepada petani dan konsumen.

Subsidi perlu diarahkan pada input produktif yang langsung menurunkan biaya produksi, seperti pupuk dan alat mesin pertanian

(alsintan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi pupuk dan alsintan mampu meningkatkan produksi. Dengan menekan biaya input, mekanisme pasar dapat berjalan lebih efisien melalui peningkatan penawaran tanpa menciptakan tekanan harga yang berlebihan. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan kepastian ketersediaan dan ketepatan sasaran subsidi.

Peningkatan efektivitas distribusi subsidi perlu menjadi prioritas kebijakan. Ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan distribusi pupuk subsidi dapat menyebabkan kelangkaan input dan mengganggu mekanisme pasar. Digitalisasi distribusi subsidi, penguatan data petani, serta pengawasan berbasis wilayah dapat memastikan bahwa subsidi diterima oleh petani yang berhak dan tepat waktu. Kebijakan subsidi harus diintegrasikan dengan kebijakan harga dan pemasaran hasil pertanian. Peningkatan produksi akibat subsidi berpotensi menurunkan harga hasil panen apabila tidak diimbangi dengan kebijakan penyerapan hasil, penetapan harga dasar, atau perluasan akses pasar. Tanpa integrasi tersebut, subsidi justru dapat menurunkan pendapatan petani meskipun produksi meningkat.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa subsidi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengarah mekanisme pasar. Oleh karena itu, subsidi harus dirancang secara selektif, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan kebijakan pasar agar mampu meningkatkan efisiensi, menekan distorsi harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak subsidi pemerintah terhadap mekanisme pasar, dapat disimpulkan bahwa subsidi memiliki peran strategis dalam memengaruhi harga, struktur pasar, biaya produksi, dan kesejahteraan petani. Namun, subsidi juga berpotensi menimbulkan distorsi pasar apabila tidak dirancang dan diimplementasikan secara tepat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan berikut dirumuskan untuk memperbaiki efektivitas subsidi dalam mendukung mekanisme pasar yang efisien dan berkeadilan. Pemerintah direkomendasikan untuk mengintegrasikan kebijakan subsidi dengan perbaikan struktur pasar pertanian, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan subsidi energi, khususnya BBM, dan perbaikan sistem distribusi dan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu

REFERENSI

Ahsani, A. F. (2020). Pengaruh Subsidi Pupuk, Dana Alokasi Khusus Pertanian Dan Bantuan Alsintan Terhadap Produksi Padi (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2

Hardiani, H., & Umiyati, E. (2015). Dampak Pemberian Subsidi Produksi Terhadap Keseimbangan Pasar pada Pasar Persaingan Sempurna

dan Pasar Monopoli. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 3(2), 59-68.

Heliaantoro, H., & Juwana, H. (2018). Prespektif praktek kebijakan subsidi dalam kaitannya dengan rencana penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk menuju kedaulatan pangan di indonesia. 4(2), 37–65. https://doi.org/10.23887/JKH.V4I2.15510

Putri, M. A., & Kumbara, K. (2024). Dinamika Subsidi dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Perspektif dari Tinjauan Literatur Sistematis. Jurnal Triton: Hasil Penelitian Terapan Bidang Penyuluhan, Sosial Ekonomi Dan Teknik Pertanian, 15(2), 510–525. https://doi.org/10.47687/jt.v15i2.848

Paramita, Y., Rosidah, A., & Suryanti, M. (2020). Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan. 4(2), 1–10. https://doi.org/10.30601/HUMANIORA.V4I2.979

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Putri, W., Fadhillah, S. N., & Monika, D. (2025). Peran ekonomi politik subsidi energi: antara kepentingan elite dan kesejahteraan rakyat. Jurnal PenKoMi, 8(2), 331–338. https://doi.org/10.33627/pk.v8i2.3471

Rahardyan, T. M., Safitra, D. A., & Hanifah, A. (2022). Defisiensi pengelolaan subsidi pada badan usaha milik negara. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.31092/jmkp.v6i1.1593

Sarbaini, S., & Nazaruddin, N. (2023). Pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia. Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan, 2(I), 25-32.

Savitri, F. D., Khalid, N., Kizul, D., Sari, D. A., Sholihah, W., & Aji, L. (2024). Penerapan matematika pada ilmu ekonomi: fungsi linier pajak dan subsidi. Journal of International Management, 3(2), 143–153. https://doi.org/10.62668/jim.v3i2.1356

Setiawan, K., & Sengadji, H. M. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Komoditas Kelapa di Kabupaten Flores Timur. Jurnal Agrica, 9(2), 80-89

Siagian, N., Gultom, D. E. M., Pakpahan, D., Sitio, S. R. S., & Siagian, T. M. N. (2023). Pengaruh Pupuk Subsidi dan Produksi Hasil Panen terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(4), 2743-2748.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Wastra, A. R. & Ahmad Dalhar 2021. Dampak Realokasi Subsidi Pupuk Menjadi Subsidi Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Gabah Terhadap Pendapatan Petani. Sharia Agribusiness Journal, 1(2), 169-194. https://doi.org/10.15408/saj.v1i2.22724